



PEMERINTAH KABUPATEN CIAMIS

DINAS KESEHATAN

Jalan Mr. Iwa Kusumasomantji No. 12 Tlp. (0265) 771139 Faxmile (0265) 773828

E-mail : dinkesciamis@ymail.com Website : www.dinkes.ciamiskab.go.id

CIAMIS

Kode Pos 46213

Nomor : 050/ 307.c - Dinkes.1/2024
Sifat : Penting
Lampiran : 2 Berkas
Hal : Laporan Kinerja Instansi
Pemerintah Dinas Kesehatan
Kabupaten Ciamis Tahun 2023

Ciamis, 21 Februari 2024

Kepada
Yth. Bapak Bupati Kabupaten Ciamis

di-

CIAMIS

Dipermaklumkan dengan hormat, berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada Lampiran II dan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 26 Tahun 2023 tentang Pedoman Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Ciamis, bersama ini terlampir Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Berkenaan dengan hal tersebut, dapat kami lapor bahwa :

1. Berdasarkan hasil pengukuran terhadap Perubahan RPJMD Tahun 2019-2024 dan Perubahan Perjanjian Kinerja Kepala Dinas Kesehatan dan Perubahan Renstra Tahun 2019-2024 (sebagaimana terlampir);
2. Penyerapan anggaran atas pelaksanaan program/kegiatan/sub kegiatan untuk mendukung capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis;
3. Prestasi dan penghargaan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 baik tingkat Provinsi maupun Nasional mencerminkan keberhasilan dalam pemerintahan dan pembangunan Kabupaten Ciamis.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2023 yang disampaikan, atas perkenan Bapak disampaikan Terima Kasih.

KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN CIAMIS



dr. H. YOYO MM.Kes
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19681208 200212 1 001

Tembusan Kepada :

- Yth. 1. Bapak Wakil Bupati Ciamis
- 2. Bapak Sekretaris Daerah Kabupaten Ciamis
- 3. Bapak Inspektur Kabupaten Ciamis

(LKIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KESEHATAN KAB. CIAMIS
TAHUN 2023

(LKIP) LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH



DINAS KESEHATAN KAB. CIAMIS
TAHUN 2023

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadirat Allah SWT, hanya berkat dan perkenan-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2022 dapat disusun dan selesai sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis tahun 2023 merupakan bentuk pertanggungjawaban atas pencapaian sasaran strategis selama Tahun Anggaran 2023. Laporan ini disusun berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2016 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Surat Edaran Menteri Negara Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 53 Tahun 2016 tentang Penyampaian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Dokumen Perjanjian Kinerja.

Semoga Laporan Kinerja ini bermanfaat, tidak lupa pula kami berharap memperoleh masukan yang bersifat konstruktif sebagai bahan untuk perbaikan dimasa yang akan datang.

Terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan Laporan ini

Ciamis, Januari 2024

Kepala Dinas Kesehatan

Kabupaten Ciamis



IKHTISAR EKSEKUTIF

Akuntabilitas kinerja merupakan kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan sasaran strategis serta program dan kegiatan yang telah diamanatkan para pemangku kepentingan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan. Hal ini sesuai dengan amanat Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), mewajibkan setiap instansi pemerintah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan negara untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan mengelola sumber daya yang dimilikinya. Pertanggungjawaban tersebut disajikan dalam bentuk Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) yang disusun secara periodik.

Penyusunan LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. LKIP Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 memuat ikhtisar pencapaian sasaran sebagaimana ditetapkan dalam dokumen perencanaan dan dokumen perjanjian kinerja. Pencapaian sasaran tersebut disajikan berupa informasi mengenai realisasi kinerja dan capaian kinerja sasaran yang disertai dengan penjelasan memadai atas pencapaian kinerja serta pembandingan capaian indikator kinerja sasaran. Laporan ini menyajikan informasi yang relevan menyangkut keberhasilan dan atau kekurangan yang terjadi pada pelaksanaan pencapaian sasaran strategis serta program dan kegiatan dalam rangka mencapai misi organisasi secara terukur sesuai dengan sasaran dan target kinerja yang telah ditetapkan.

Berdasarkan dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2023 telah ditetapkan 6 sasaran strategis dengan 35 indikator sasaran, dengan capaian kinerja setiap sasaran sebagai berikut:

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja %	Keterangan
1.	Menurunkan Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk	Jumlah Kematian Ibu	33 Kasus	22 Kasus	33,33	Melebihi Target
		Jumlah Kematian Bayi	112 Kasus	148 Kasus	132,14	Tidak Mencapai Target
		Persentase Balita Gizi Buruk	0,49%	0,26%	46,94	Melebihi Target
		Persentase Balita Stunting	7%	4%	42,86	Melebihi Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%	79,6%	20,40	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%	89,2%	10,80	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%	88,5%	11,50	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%	98,4%	1,60	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%	93,6%	6,40	Tidak Mencapai Target
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	100%	100%	100	Mencapai Target

	Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	45%	45,3%	0,67	Melebihi Target
		Persentase Posyandu Strata Mandiri	85%	76%	10,59	Tidak Mencapai Target
		Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	86%	65,7%	23,60	Tidak Mencapai Target
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Tradisional Sesuai Standar Mutu	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	100%	100%	100	Mencapai Target
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,9	0,142%	84,22	Tidak Mencapai Target
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,510‰	0,80‰	56,86	Tidak Mencapai Target
		Persentase Cakupan PBI Jamkesda	100%	125,15%	25,15	Melebihi Target
		Bed Occupancy Rate (BOR)	50%	59,6%	19,20	Melebihi Target
		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	86%	76,94%	10,53	Tidak Mencapai Target
4	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%	72,4%	27,55	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%	129,7%	29,70	Melebihi Target

	Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%	95,6%	4,31	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%	156,4%	56,44	Melebihi Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%	112,1%	12,17	Melebihi Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	100%	108,3%	8,03	Melebihi Target
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	100%	86,5%	13,44	Tidak Mencapai Target
		Cakupan Desa UCI	96%	91,7%	4,48	Tidak Mencapai Target
		Percentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	100%	100%	100	Mencapai Target
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDMK Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	37 Puskesmas	16 Puskesmas	56,76	Tidak Mencapai Target
		Percentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin	100%	100%	100	Mencapai Tar get

	Dan Alat Kesehatan	Imunisasi Dasar Pada Puskesmas				
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	100%	74,5%	25,45	Tidak Mencapai Target
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	Level Maturitas SPIP	3			
		Hasil Evaluasi AKIP	BB			
		Kinerja Pelaporan Keuangan	600			
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,20			

DAFTAR ISI

COVER	i
KATA PENGANTAR	ii
IKHTISAR EKSEKUTIF	iii
DAFTAR ISI	viii
DAFTAR TABEL	ix
DAFTAR GRAFIK	x
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan	2
C. Isu Strategis	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	10
A. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan	10
B. Perjanjian Kinerja	14
C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	17
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	25
A. Capaian Kinerja Organisasi	25
B. Akuntabilitas Keuangan	63
C. Prestasi (Perangkat Daerah)	64
BAB IV PENUTUP	65
LAMPIRAN	66

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin	3
Tabel 1.2 Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat	4
Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional	5
Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024	11
Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	15
Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023	17
Tabel 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab	24
Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023.....	25
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023	57
Tabel 3.3 Data Capaian Kinerja Tahun 2021-2023	59
Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjakuuan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan Target Perubahan RPJMD	61
Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjakuuan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan Standar Provinsi Jawa Barat/Nasional	62
Tabel 3.6 Data Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023.....	63

DAFTAR GRAFIK

Grafik 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin.....	4
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat.....	5
Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional	6

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, seluruh instansi pemerintah diwajibkan untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya serta kewenangan pengelolaan sumberdaya berdasarkan pada perencanaan strategi yang ditetapkan oleh masing-masing instansi pemerintah.

Pelaksanaan sistem akuntabilitas kinerja pada Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis dilakukan sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Umum Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah.

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 disusun sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas menyelenggarakan perumusan kebijakan umum Pemerintah Daerah serta pelaksanaan fungsi koordinasi, pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan tugas dan kebijakan daerah yang diamanatkan oleh Kepala Daerah kepada para Perangkat Daerah dimana, LKIP Dinas Kesehatan Tahun 2023 menggambarkan upaya pencapaian sasaran strategis

sebagaimana dicantumkan dalam Rencana Strategis (Renstra) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019-2024 dan diperjanjikan dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2023, dan menyajikan data dan informasi yang disertai dengan analisis dan interpretasi pencapaian kinerja, sehingga pelaporan tidak hanya memuat data namun juga informasi yang cukup memenuhi prinsip akuntabilitas kinerja. LKIP hal ini sebagai alat kendali dan pemotivasi peningkatan kinerja dan pemberahan manajemen internal di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis, serta perbaikan kinerja di masa yang akan datang.

B. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Dinas Kesehatan

Berdasarkan Peraturan Bupati Ciamis Nomor 64 Tahun 2021 tentang Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Unsur Organisasi Dinas Kesehatan, bahwa Dinas Kesehatan mempunyai tugas membantu Bupati dalam bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan bidang kesehatan.

Dinas Kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Selanjutnya pada Ayat (2) menguraikan fungsi Dinas Kesehatan:

1. perumusan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan makanan minuman, serta pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan urusan kesehatan yang meliputi upaya kesehatan, Sumber Daya Manusia (SDM) kesehatan, sediaan farmasi, alat kesehatan, dan

- makanan minuman, dan pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan sesuai dengan lingkup tugasnya;
 4. pelaksanaan administrasi dinas sesuai dengan lingkup tugasnya; dan
 5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

Dalam rangka melaksanakan tugas dan fungsinya, berikut adalah susunan organisasi Dinas Kesehatan :

1. Kepala Perangkat Daerah;
2. Sekretariat Perangkat Daerah, terdiri atas
 - a. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 - b. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
3. Bidang Pelayanan Kesehatan
4. Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit
5. Bidang Kesehatan Masyarakat
6. Bidang Sumber Daya Kesehatan
7. UPT Puskesmas

Dalam menunjang pelaksanaan kegiatan pada Tahun 2023 Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis memiliki komposisi pegawai sebanyak 1052 orang. Dari jumlah pegawai sebanyak 1052 orang dapat dilihat pada tabel berikut:

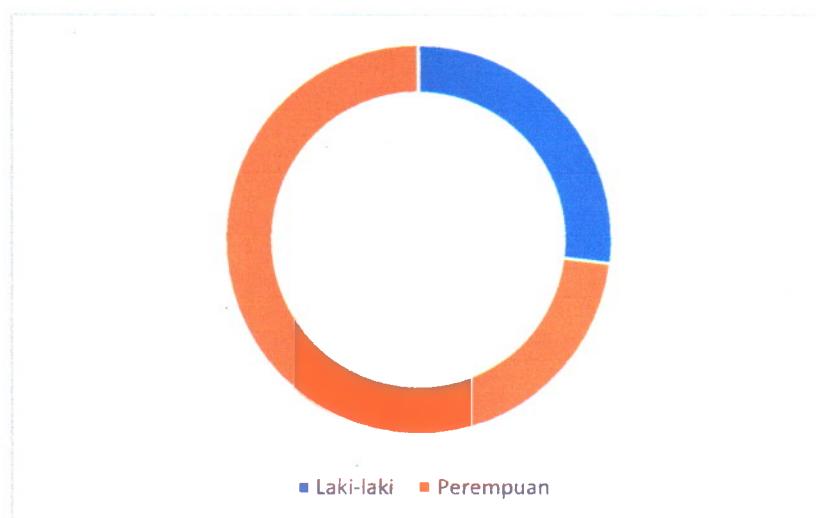
Contoh:

Tabel 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Unit Kerja	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Bidang Kemas	4	7	11
2	Bidang Yankes	3	1	4
3	Bidang P2P	6	6	12

4	Bidang SDK	3	2	5
5	Sub Bag Keuangan Perencanaan	4	10	14
6	Sub Bag Umum Kepegawaian	6	1	7
7	UPT Puskesmas	211	661	872
8	UPT Farmasi	3	4	7
9	UPT Labkesda	1	5	6
10	RSUD Kawali	43	71	114
Jumlah		284	768	1052

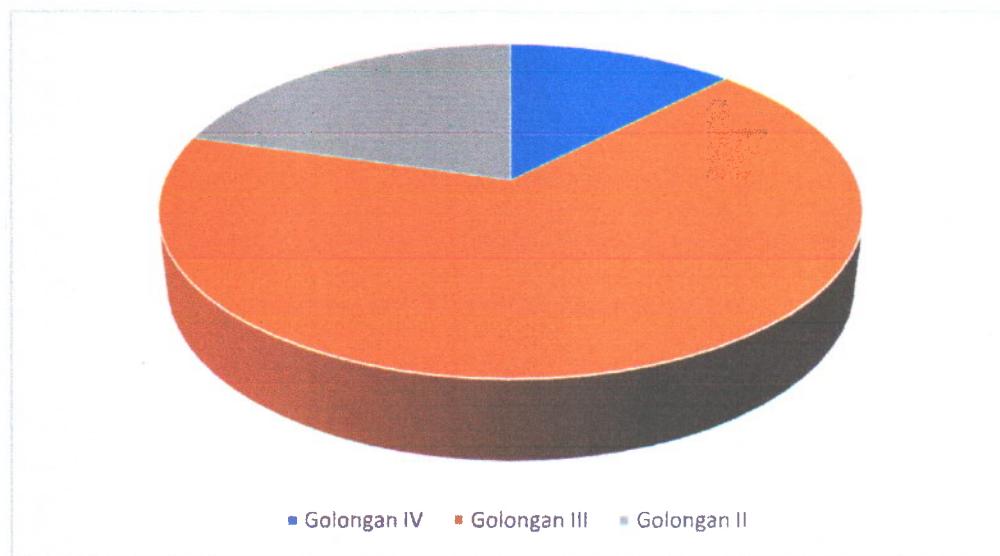
Grafik 1.1 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Jenis Kelamin



Tabel 1.2 Kondisi Pegawai (Perangkat Daerah) Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat

No	Pangkat/Golongan	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Golongan IV	50	81	131
2	Golongan III	193	511	704
3	Golongan II	44	173	217
4	Golongan I	0	0	0
Jumlah		287	765	1052

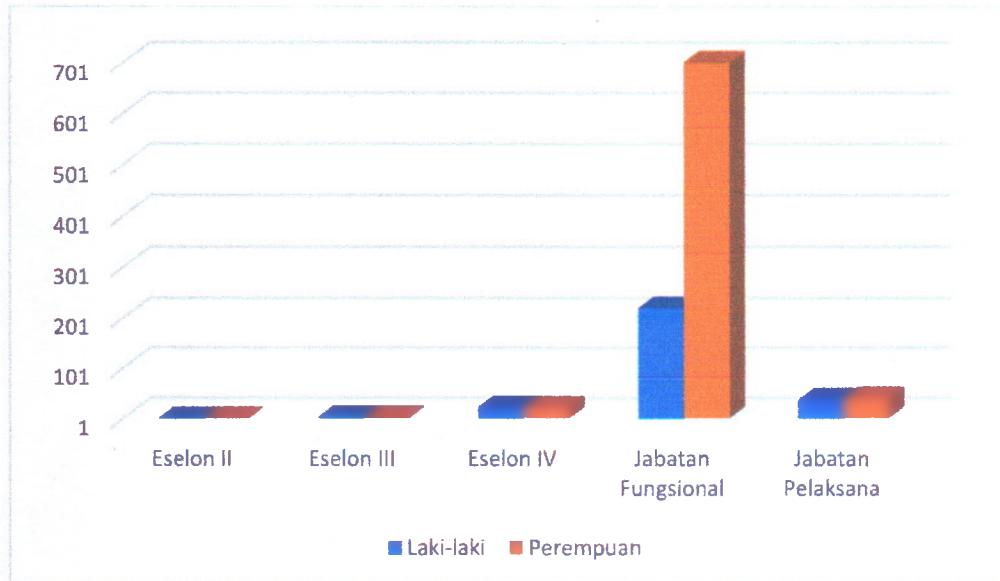
Grafik 1.2 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Golongan/Pangkat



Tabel 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Keschatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Tingkat Eselonering/Fungsional

No	Eselon	Jumlah		Jumlah
		L	P	
1	Eselon II	1	0	1
2	Eselon III	4	2	6
3	Eselon IV	23	22	45
4	Jabatan Fungsional	221	701	922
5	Jabatan Pelaksana	38	40	78
Jumlah		287	765	1052

Grafik 1.3 Kondisi Pegawai Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Berdasarkan Eselonering/Fungsional



C. Isu Strategis

1. Masih terdapat kasus Kematian Ibu dan kematian Bayi di Kabupaten Ciamis
2. Masih terdapat penderita stunting dan gizi buruk dengan capaian dibawah rata-rata nasional
3. Masih rendahnya jumlah Desa Siaga Aktif Strata Purnama dan Mandiri yang merupakan bentuk pemberdayaan masyarakat dalam rangka meningkatkan kemandirian masyarakat untuk memecahkan permasalahan kesehatan.
4. Belum optimalnya pelaksanaan lima pilar Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) yang terdiri dari Stop Buang Air Besar Sembarangan, Cuci Tangan Pakai Sabun, Pengelolaan Air Minum Makanan Rumah Tangga, Pengamanan Sampah Rumah Tanga dan Pengamanan Limbah Cair Rumah Tangga.
5. Indeks Keluarga Sehat (IKS) Program Indonesia Sehat dengan Pendekatan Keluarga (PIS-PK) Kabupaten Ciamis masih dikategorikan Tidak Sehat

6. Kualitas sarana pelayanan dasar Puskesmas, Pustu dan jaringannya di beberapa wilayah masih belum memenuhi standar yang dipersyaratkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan RI Nomor 43 Tahun 2019 tentang Puskesmas.
7. Belum tercapainya Universal Health Coverage (UHC)/seluruh masyarakat Kabupaten Ciamis mendapatkan pelayanan kesehatan yang komprehensif dan bermutu tanpa hambatan finansial
8. Masih terdapatnya penyebaran beberapa penyakit menular dan tidak menular dan kejadian luar biasa/potensial wabah yang berkontribusi terhadap kesakitan dan kematian.
9. Masih terdapat penyakit yang dapat dicegah dengan imunisasi (PD3I) dengan capaian Imunisasi Dasar Lengkap (IDL) dan Universal Child Immunization (UCI) belum optimal
10. Masih terdapat Puskesmas yang belum memenuhi Standar Sarana, Prasarana, dan Alat Kesehatan (SPA) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 31 Tahun 2018 tentang Aplikasi Sarana, Prasarana, Dan Alat Kesehatan

1. Penyederhanaan Birokrasi

Penerapan Penyederhanaan Birokrasi di lingkungan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis menjadi kenyataan dengan dialihkannya sebagian pejabat struktural eselon IV menjadi Fungsional pada Bulan Desember 2021 lalu. Dengan kebijakan tersebut, unit kerja eselon IV menjadi unit yang paling terdampak proses penyederhanaan birokrasi ini. Unit kerja tersebut berperan menjadi ujung tombak keahlian pada tingkat operasional, yang dengan proses penyederhanaan diharapkan dapat mempercepat dan menyederhanakan proses pelaksanaan tugas terutama yang

berkaitan dengan pelayanan masyarakat. Unit eselon IV yang masih tersisa pada unit kerja adalah yang bersifat manajerial umum yaitu yang menangani ketatausahaan, mengingat rumpun tugasnya yang heterogen. Dinas Kesehatan menagalami perubahan sangat signifikan dari perubahan birokrasi ini. dari 18 Jabatan terdapat 10 jabatan eselon IV yang disederhanakan.

Dinas Kesehatan yang semula dominan struktural menjadi fungsional. Untuk beralih ke arah sistem birokrasi yang baru, perlu dibangun kebijakan tata hubungan kerja baru, serta perubahan mindset, sultural set dan skill set aparatur. Hingga beberapa tahun mendatang, unit kerja dan aparatur masih memerlukan proses adaptasi agar perubahan ini berjalan efektif dan menghasilkan dampak bagi perbaikan kualitas penyelenggaraan pemerintahan. Proses penyederhanaan birokrasi menjadi langkah awal untuk mewujudkan organisasi Dinas Kesehatan yang agile, lebih efektif dan lebih ramping

2. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik

Pandemi Covid-19 memberikan dampak terhadap pelayanan publik yang diberikan Sekretariat Daerah. Sebagian penyelenggaraan pelayanan publik dibatasi pelaksanaannya, seperti pemberian layanan langsung, dan penerimaan kunjungan. Modernisasi sarana dan prasarana perkantoran di Perangkat Daerah juga perlu diprioritaskan untuk mendukung peningkatan pelayanan publik mendatang. Sebagian besar sarana dan prasarana di lingkungan Perangkat Daerah kurang representatif dan kurang memadai untuk memenuhi kebutuhan publik dan perkembangan teknologi. Berdasarkan hasil survei, kecepatan pelayanan menjadi persoalan utama yang

dikeluhkan publik. Sementara dari sisi aparatur, selain kualitas sarana/prasarana, kualitas jaringan telekomunikasi masih menjadi persoalan. Hal ini perlu diperbaiki untuk mendukung pola kerja baru aparatur.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Tujuan dan Sasaran Dinas Kesehatan

Secara umum, peran Dinas Kesehatan sebagai unit kerja pendukung penyelenggaraan pembangunan Pemerintah Kabupaten Ciamis adalah melaksanakan urusan bidang kesehatan. Secara spesifik, peran Dinas Kesehatan terlihat pada kontribusi langsung terhadap pencapaian visi dan misi RPJMD Kabupaten Ciamis yaitu:

“Mantapnya Kemandirian Ekonomi, Sejahtera untuk Semua”. Untuk mewujudkan visi tersebut, ditetapkan 6 (enam) misi pembangunan Kabupaten Ciamis 2019-2024 sebagai berikut :

Misi 1. Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia

Misi 2. Meningkatnya ketersediaan infrastruktur wilayah yang mendukung perkembangan wilayah

Misi 3. Membangun perekonomian berbasis pemberdayaan masyarakat, ekonomi kerakyatan dan potensi unggulan lokal

Misi 4. Memanfaatkan sumberdaya alam dan lingkungan hidup secara bijaksana untuk mendukung pembangunan berkelanjutan

Misi 5. Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang efektif dan efisien

Misi 6. Penguanan otonomi desa dalam rangka mewujudkan kemandirian masyarakat dan desa

Dinas Kesehatan sebagai Perangkat Daerah memiliki kewajiban dalam upaya mendukung pencapaian misi yang telah ditetapkan. Diantara misi tersebut yang paling berkaitan dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Kesehatan adalah misi pertama yaitu meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Kualitas sumber daya manusia sangat dipengaruhi oleh derajat kesehatan yang dimilikinya sehingga diperlukan upaya peningkatan kualitas serta akses layanan kesehatan.

Dinas Kesehatan mendukung 6 sasaran strategis pembangunan daerah Kabupaten Ciamis yang dijabarkan sebagai berikut:

Tabel 2.1 Tujuan Dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2019 – 2024

	Tujuan Sasaran	Indikator Tujuan/Sasaran	Satuan	Target Kinerja				
				2020	2021	2022	2023	2024
1	Misi 1: Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Manusia							
1.	Tujuan : Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan	Indeks kesehatan	Nilai	79,74	79,80	79,98	80,20	80,46
	Sasaran 1 : Menurunya Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk	Jumlah Kematian Ibu	Perseratus ribu	62,18				
		Jumlah Kematian Bayi	Perseribu	5,97	5,92	5,86	5,81	5,71
		Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Balita Stunting						
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	100	100	100	100

		Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	100	100	100	100
	Sasaran 2 : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	70	75	80	85	90
		Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	Persen	80	82	84	86	88
	Sasaran 3 : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Tradisional Sesuai Standar Mutu	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Persen	100	100	100	100	100
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Indeks	0,9	0,9	0,9	0,9	0,9
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Perseribu	0,486	0,496	0,500	0,510	0,525
		Persentase Cakupan PBI Jamkesda	Persen	100	100	100	100	100
		Bed Occupancy Rate (BOR)						

		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit					
	Sasaran 4 : Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	Persen	100	100	100	100
		Cakupan Desa UCI	Persen	93	94	95	96
		Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	Persen	100	100	100	100

	Sasaran 5 : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDMK Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	Puskesmas	37	37	37	37	37
		Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	Persen	100	100	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	Persen	87,03	90,27	93,51	96,76	100
	Sasaran 6 : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	Level Maturitas SPIP	Nilai	3	3	3	3	3
		Hasil Evaluasi AKIP	Nilai	BB	BB	BB	BB	BB
		Kinerja Pelaporan Keuangan	Nilai	550	560	580	600	650
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,20	81,40	81,60	81,80	82,00

B. Perjanjian Kinerja

Dengan telah ditetapkannya sasaran dan indikator kinerja utama yang mencerminkan kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis untuk Tahun 2023, maka sasaran dan indikator tersebut dituangkan ke dalam perjanjian kinerja. Adapun Perjanjian Kinerja Utama dimaksud sebagai berikut:

**Tabel 2.2 Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun Anggaran 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
			2023
1	2	3	4
1	Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk	1 Jumlah Kematian Ibu	33 Kasus
		2 Jumlah Kematian Bayi	112 Kasus
		3 Persentase Balita Gizi Buruk	0,49%
		4 Persentase Balita Stunting	7%
		5 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	100%
		6 Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	100%
		7 Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	100%
		8 Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	100%
		9 Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	100%
2	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat	1 Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	100%
		2 Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	45%
		3 Persentase Posyandu Strata Mandiri	85%
		4 Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	86%
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan	1 Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	100%

	Rujukan Serta Tradisional Sesuai Standar Mutu	2	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	0,9
		3	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	0,510%
		4	Persentase Cakupan PBI Jamkesda	100%
		5	Bed Occupancy Rate (BOR)	50%
		6	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	86%
4	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa	1	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	100%
		2	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	100%
		3	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	100%
		4	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	100%
		5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	100%
		6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	100%
		7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	100%
		8	Cakupan Desa UCI	96%
		9	Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	100%

5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDMK Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	1	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	37 Puskesmas
		2	Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	100%
		3	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	100%
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	1	Level Maturitas SPIP	3
		2	Hasil Evaluasi AKIP	BB
		3	Kinerja Pelaporan Keuangan	600
		4	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	81,20

C. Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis

Dalam mencapai tujuan dan sasaran yang merupakan penjabaran strategis organisasi, maka diperlukan rencana program dan kegiatan.

Rumusan rencana program dan kegiatan Dinas Kesehatan Tahun 2023 adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3 Strategi, Program dan Kegiatan Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun Anggaran 2023

No	Sasaran	Program	Kegiatan	Sub Kegiatan
1.	Meningkatnya kualitas dan aksesibilitas	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

pelayanan kesehatan	DAERAH KABUPATEN/KOTA	Perangkat Daerah	
		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Penyediaan Gaji Dan Tunjangan ASN
		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
			Penyediaan Peralatan Dan Perlengkapan Kantor
			Penyediaan Bahan Logistik Kantor
			Penyediaan Barang Cetakan Dan Penggandaan
			Penyediaan Bahan Bacaan Dan Peraturan Perundang-Undangan
			Penyelenggaraan Rapat Koordinasi Dan Konsultasi Skpd
		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Pengadaan Sarana Dan Prasarana Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
			Pengadaan Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya

			Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan jasa surat menyurat
				Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air Dan Listrik
				Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
			Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak, Dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional Atau Lapangan
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor Dan Bangunan Lainnya
				Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana Dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor Atau Bangunan Lainnya
			Peningkatan Pelayanan BLUD	Pelayanan Dan Penunjang Pelayanan Blud
		PROGRAM PEMENUHAN UPAYA KESEHATAN PERORANGAN DAN UPAYA KESEHATAN MASYARAKAT	Penyediaan Fasilitas Pelayanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota	Pengembangan Puskesmas

				Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Rumah Sakit
				Rehabilitasi Dan Pemeliharaan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pengadaan Prasarana Dan Pendukung Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan
				Pengadaan Obat, Vaksin
				Pengadaan Bahan Habis Pakai
			Penyediaan Layanan Kesehatan untuk UKM dan UKP Rujukan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Balita
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif

				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Risiko Terinfeksi Hiv
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Gizi Masyarakat
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Kerja Dan Olahraga
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Lingkungan
				Pengelolaan Pelayanan Promosi Kesehatan
				Pengelolaan Surveilans Kesehatan
				Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Jiwa Dan Napza
				Pengelolaan Upaya Kesehatan Khusus

				Pelayanan Kesehatan Penyakit Menular Dan Tidak Menular
				Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat
				Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya
				Pelaksanaan Akreditasi Fasilitas Kesehatan Di Kabupaten/Kota
			Penyelenggaraan Sistem Informasi Kesehatan secara Terintegrasi	Pengelolaan Data Dan Informasi Kesehatan
				Pengelolaan Sistem Informasi Kesehatan
			Penerbitan Izin Rumah Sakit Kelas C, D dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Peningkatan Tata Kelola Rumah Sakit Dan Fasilitas Pelayanan Kesehatan Tingkat Daerah Kabupaten/Kota
	PROGRAM PENINGKATAN KAPASITAS SUMBER DAYA MANUSIA KESEHATAN	Pemberian Izin Praktik Tenaga Kesehatan di Wilayah Kabupaten/Kota	Pembinaan Dan Pengawasan Tenaga Kesehatan Serta Tindak Lanjut Perizinan Praktik Tenaga Kesehatan	

			Perencanaan Kebutuhan dan Pendayagunaan Sumberdaya Manusia Kesehatan untuk UKP dan UKM di Wilayah Kabupaten/Kota	Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar
		PROGRAM SEDIAAN FARMASI, ALAT KESEHATAN DAN MAKANAN MINUMAN	Pemberian Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (UMOT)	Fasilitasi Pemenuhan Komitmen Izin Apotek, Toko Obat, Toko Alat Kesehatan, Dan Optikal, Usaha Mikro Obat Tradisional (Umot)
			Penerbitan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, untuk Produk Makanan Minuman Tertentu yang dapat Diproduksi oleh Industri Rumah Tangga	Pengendalian Dan Pengawasan Serta Tindak Lanjut Pengawasan Sertifikat Produksi Pangan Industri Rumah Tangga Dan Nomor P-Irt Sebagai Izin Produksi, Untuk Produk Makanan Minuman Tertentu Yang Dapat Diproduksi Oleh Industri Rumah Tangga
		PROGRAM PEMBERDAYAAN	Advokasi, Pemberdayaan, Kemitraan,	Peningkatan Upaya Promosi Kesehatan, Advokasi, Kemitraan Dan

		MASYARAKAT BIDANG KESEHATAN	Peningkatan Peran serta Masyarakat dan Lintas Sektor Tingkat Daerah Kabupaten/Kota	Pemberdayaan Masyarakat
--	--	--	---	----------------------------

Dalam pelaksanaan program dan kegiatan telah ditetapkan anggaran sebesar **Rp 450.777.422.616,-** yang dirinci sebagai berikut:

Tabel 2.4 Anggaran Program dan Penanggung Jawab

No	Program	Pendanaan	Penanggung Jawab
1.	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan dan Upaya Kesehatan Masyarakat	151.558.455.769,00	Bidang Kesmas, P2P, Yankes
2.	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.780.724.000,00	Bidang SDK
3.	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan dan Makanan Minuman	547.454.000,00	Bidang SDK
4.	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.014.261.293,00	Bidang Kesmas
5.	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.876.527.554,00	Sekretariat

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Akuntabilitas kinerja merupakan perwujudan kewajiban suatu instansi pemerintah dalam mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi, dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat pertanggungjawaban secara periodik. Kinerja instansi pemerintah merupakan gambaran mengenai pencapaian sasaran ataupun tujuan instansi pemerintah yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

Data capaian kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023 sebagai berikut:

**Tabel 3.1 Data Capaian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis
Tahun 2023**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	CAPAIAN (%)
1.	Menurunka Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk	Jumlah Kematian Ibu	Kaus	33	13	60,61
		Jumlah Kematian Bayi	Kasus	112	101	9,82
		Persentase Balita Gizi Buruk	Person	0,49	0,26	46,94
		Persentase Balita Stunting	Person	7	4	42,86
		Cakupan Pelayanan	Person	100	79,60	20,40

	Kesehatan Ibu Hamil					
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	89,20	10,80	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	88,50	11,50	
	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	98,40	1,60	
	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	93,60	6,40	
2.	Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	Persen	100	100	100
	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	45	45,30	0,67	
	Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	85	76,00	10,59	
	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	Persen	86	65,70	23,60	
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Tradisional	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Persen	100	100	100

	Sesuai Standar Mutu					
		Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,9	0,142	84,22
		Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Perseratus ribu	0,510	0,80	58,86
		Persentase Cakupan PBI Jamkesda	Persen	100	125,15	25,15
		Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	50	59,60	19,20
		Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	86	76,94	10,53
4	Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100	72,45	27,55
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100	129,70	29,70
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100	95,69	4,30
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	156,44	56,44
		Cakupan Pelayanan	Persen	100	112,17	12,17

		Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat				
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	Persen	100	108,30	8,03
		Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	Persen	100	86,56	13,44
		Cakupan Desa UCI	Persen	96	91,70	4,48
		Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	Persen	100	100	100
5	Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDMK Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	Puskesmas	37	16	56,76
		Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	Persen	100	100	100
		Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar	Persen	100	74,55	25,45

		dan Rujukan Sesuai Standar				
6	Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja dan Kapasitas Organisasi Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis	Level Maturitas SPIP	Nilai	3		
	Hasil Evaluasi AKIP	Mutu	BB			
	Kinerja Pelaporan Keuangan	Nilai	600			
	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,20			

Sasaran Strategis :

- Sasaran Strategis I** : Menurunnya Jumlah Kematian Ibu Dan Bayi Serta Balita Gizi Buruk
- Sasaran Strategis II** : Meningkatnya Kemandirian Masyarakat Untuk Hidup Sehat Didalam Lingkungan Yang Sehat
- Sasaran Strategis III** : Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dasar Dan Rujukan Serta Tradisional Sesuai Standar Mutu
- Sasaran Strategis IV** : Menurunnya Angka Kesakitan dan Kematian Akibat Penyakit Menular dan Tidak Menular Serta Meningkatnya Kesehatan Jiwa
- Sasaran Strategis V** : Meningkatnya Kualitas dan Kuantitas SDMK Dan Terpenuhinya Sediaan Kefarmasian Dan Alat Kesehatan

**Sasaran Strategis VI : Meningkatnya Akuntabilitas Kinerja
dan Kapasitas Organisasi Dinas
Kesehatan Kabupaten Ciamis.**

Dengan 6 sasaran strategis diatas merupakan kondisi yang ingin diciptakan sebagai pertanggungjawaban dalam melaksanakan core competence-nya. Hal ini sebagai upaya dalam memastikan pembangunan yang dihasilkan Pemerintah Kabupaten Ciamis yang berkualitas. Adapun fokus yang diarahkan kepada kebijakan-kebijakan yang memiliki dampak terhadap masyarakat. Kondisi ini mendukung perwujuduan pada misi 1 yaitu Meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

Bahwa untuk tercapainya kemandirian ekonomi, diperlukan sumber daya manusia yang berkualitas sehingga mempunyai kemampuan untuk mengolah sumber daya ekonomi yang tersedia guna meningkatkan kesejahteraan

Berkaitan dengan itu, sasaran ini memiliki 35 indikator yaitu

1. Jumlah Kematian Ibu
2. Jumlah Kematian Bayi
3. Persentase Balita Gizi Buruk
4. Persentase Balita Stunting
5. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil
6. Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin
7. Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir
8. Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita
9. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar
10. Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM
11. Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri
12. Persentase Posyandu Strata Mandiri
13. Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat

14. Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi
 15. Indeks Keluarga Sehat (IKS)
 16. Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk
 17. Persentase Cakupan PBI Jamkesda
 18. Bed Occupancy Rate (BOR)
 19. Persentase Capaian SPM Rumah Sakit
 20. Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif
 21. Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut
 22. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi
 23. Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus
 24. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat
 25. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC
 26. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV
 27. Cakupan Desa UCI
 28. Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani
 29. Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar
 30. Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas
 31. Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar
 32. Level Maturitas SPIP
 33. Hasil Evaluasi AKIP
 34. Kinerja Pelaporan Keuangan
 35. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)
- Secara lebih rinci, analisis ketercapaian kinerja masing-masing indikator disajikan sebagai berikut:

a) Jumlah Kematian Ibu

Jumlah kematian ibu merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur indikator yang dihitung untuk mengukur tingkat risiko kematian yang terkait dengan kehamilan, persalinan, dan masa nifas. AKI umumnya diukur per 100.000 kelahiran hidup dalam suatu periode waktu tertentu. Angka Kematian Ibu memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan ibu selama masa kehamilan dan persalinan, serta kualitas sistem perawatan kesehatan maternal di suatu wilayah atau negara. Semakin rendah Angka Kematian Ibu, semakin baik perawatan kesehatan maternal dan semakin rendah risiko kematian ibu selama kehamilan dan persalinan.

Data menunjukkan bahwa jumlah kematian ibu telah mengalami penurunan signifikan dari target yang ditetapkan. Target jumlah kematian ibu sebanyak 33 kasus, namun kenyataannya hanya terjadi 13 kasus. Capaian kinerja mencapai 60,61%, yang menandakan peningkatan kesejahteraan bagi ibu yang melahirkan. Penurunan jumlah kematian ibu menjadi 13 kasus menunjukkan adanya kemajuan yang positif dalam sistem pelayanan kesehatan maternal. Semakin sedikit jumlah kematian ibu menandakan efektivitas dari program-program pencegahan dan penanggulangan yang telah dilakukan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat. Ini adalah indikator positif dalam menilai kualitas pelayanan kesehatan maternal.

b) Jumlah Kematian Bayi

Jumlah kematian bayi indikator yang dihitung untuk mengukur tingkat kematian pada anak-anak di bawah usia satu tahun dalam suatu populasi. AKB diukur dengan jumlah kematian bayi per 1.000 kelahiran hidup dalam

suatu periode waktu tertentu. Angka Kematian Bayi memberikan gambaran tentang tingkat kesehatan bayi dan kualitas perawatan maternal dan neonatal. Ini mencerminkan risiko kematian yang dihadapi bayi sejak lahir hingga usia satu tahun. Angka ini dapat memberikan wawasan tentang kualitas pelayanan kesehatan maternal dan perawatan neonatal, serta faktor-faktor lain yang dapat mempengaruhi kesehatan bayi, seperti gizi, sanitasi, dan akses ke perawatan medis.

Jumlah kematian bayi mengalami penurunan signifikan dari target yang telah ditetapkan. Target jumlah kematian bayi sebanyak 112 kasus, namun realisasi yang terjadi hanya 101 kasus. Capaian kinerja mencapai 9,82%, yang menunjukkan perbaikan yang signifikan dalam kesejahteraan bayi yang baru lahir. Penurunan jumlah kematian bayi menjadi 24 kasus menandakan efektivitas dari program-program pencegahan dan penanggulangan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat. Hal ini juga mencerminkan upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan maternal dan neonatal.

c) Persentase Balita Gizi Buruk

Persentase balita dengan gizi buruk merupakan indikator yang dihitung dalam mengukur tingkat malnutrisi atau kekurangan gizi pada anak-anak balita. Indikator ini membantu mengidentifikasi sejauh mana anak-anak di suatu populasi mengalami masalah gizi yang dapat memengaruhi pertumbuhan dan perkembangan mereka. Upaya untuk mengurangi persentase balita dengan gizi buruk melibatkan program-program gizi, penyuluhan tentang pola makan sehat, penyediaan akses terhadap makanan bergizi, dan perbaikan kondisi sanitasi.

Penanggulangan gizi buruk pada anak-anak merupakan bagian penting dari upaya global untuk meningkatkan kesehatan anak dan mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, terutama yang terkait dengan kesehatan dan nutrisi.

Data menunjukkan bahwa persentase balita dengan gizi buruk mengalami penurunan dari target yang telah ditetapkan. Target persentase balita gizi buruk adalah sebesar 0,49%, namun kenyataannya hanya mencapai 0,26%. Capaian kinerja mencapai 46,94%, yang menandakan perbaikan dalam kondisi gizi balita. Penurunan persentase balita dengan gizi buruk menjadi 0,26% menunjukkan adanya efektivitas dari program-program intervensi gizi yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat. Ini juga mencerminkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akses terhadap makanan bergizi, edukasi tentang pola makan yang sehat, serta pemberian suplemen gizi kepada balita yang membutuhkannya.

d) Persentase Balita Stunting

Persentase balita stunting adalah indikator yang dihitung dalam mengukur tingkat kekurangan pertumbuhan linier pada anak-anak. Stunting terjadi ketika seorang anak memiliki tinggi badan yang lebih pendek dari standar pertumbuhan yang seharusnya sesuai dengan usianya. Indikator ini mencerminkan masalah pertumbuhan kronis dan kekurangan gizi pada masa anak-anak. Stunting dapat memiliki dampak serius pada perkembangan fisik dan kognitif anak, dan dapat meningkatkan risiko penyakit kronis di masa dewasa. Oleh karena itu, persentase stunting menjadi indikator yang

penting dalam pemantauan dan evaluasi program kesehatan dan nutrisi anak-anak.

Persentase balita stunting mengalami penurunan yang signifikan dari target yang telah ditetapkan. Target persentase balita stunting adalah sebesar 7%, namun kenyataannya hanya mencapai 4%. Capaian kinerja mencapai 42,86%, yang menandakan adanya perbaikan yang berarti dalam kondisi gizi dan pertumbuhan balita. Penurunan persentase balita stunting menjadi 4% menunjukkan efektivitas dari program-program intervensi gizi dan kesehatan yang telah diterapkan oleh pemerintah dan lembaga kesehatan setempat. Hal ini juga mencerminkan upaya yang telah dilakukan dalam meningkatkan akses terhadap gizi yang baik, pendidikan tentang pola makan yang sehat, serta perawatan kesehatan yang memadai bagi balita.

e) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana ibu hamil memperoleh pelayanan kesehatan yang diperlukan selama masa kehamilan mereka. Indikator ini mencerminkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal yang diberikan kepada ibu hamil untuk memastikan kehamilan yang sehat dan aman.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk ibu hamil mengalami ketidakcapaian dari target yang telah ditetapkan. Target cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil adalah 100%, namun realisasinya hanya mencapai 79,6%. Capaian kinerja mencapai 20,40%, yang menandakan adanya kesenjangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu hamil. penyebab ketidakcapaian ini bisa bervariasi, mulai dari masalah

aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan layanan yang memadai, hingga kesadaran masyarakat tentang pentingnya pelayanan kesehatan maternal. Selain itu, faktor-faktor sosial dan ekonomi juga dapat mempengaruhi akses dan penggunaan pelayanan kesehatan ibu hamil. Dalam rangka meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan ibu hamil, perlu dilakukan upaya-upaya untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan, meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya perawatan prenatal, serta mengidentifikasi dan mengatasi hambatan-hambatan yang menghalangi ibu hamil untuk mendapatkan layanan.

f) Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin

Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana ibu mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan selama proses persalinan. Indikator ini mencerminkan akses dan kualitas pelayanan kesehatan maternal yang diberikan kepada ibu saat melahirkan untuk memastikan kelahiran yang aman dan mendukung kesehatan ibu dan bayi.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk ibu bersalin tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target cakupan pelayanan kesehatan ibu bersalin adalah 100%, namun realisasinya hanya mencapai 89,2%. Capaian kinerja mencapai 10,80%, yang menunjukkan terdapat kesenjangan dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang memadai bagi ibu yang sedang melahirkan. Faktor-faktor yang menyebabkan ketidakcapaian ini termasuk masalah aksesibilitas terhadap fasilitas kesehatan, ketersediaan tenaga medis dan peralatan yang memadai. Diperlukan upaya-upaya yang lebih intensif dalam

meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan maternal di tingkat masyarakat.

g) Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir

Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana bayi yang baru lahir menerima pelayanan kesehatan yang diperlukan dalam waktu singkat setelah kelahiran. Indikator ini mencerminkan upaya untuk memberikan perawatan segera dan kritis kepada bayi baru lahir untuk mendukung kelangsungan hidup dan kesehatan mereka.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk bayi baru lahir tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target cakupan pelayanan kesehatan bayi baru lahir adalah 100%, namun realisasinya hanya mencapai 88,5%. Capaian kinerja mencapai 11,50%, yang menunjukkan adanya kesenjangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi bayi yang baru lahir. Ketidakcapaian ini termasuk kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, terutama di daerah pedesaan, kurangnya kesadaran ibu mengenai pentingnya perawatan kesehatan yang diperlukan bagi bayi baru lahir, serta masalah infrastruktur dan sumber daya yang memadai di fasilitas kesehatan.

h) Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita

Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana balita atau anak usia dini menerima pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan dan perkembangan mereka. Indikator ini mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan yang dapat memengaruhi kesejahteraan balita.

Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan untuk balita hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Target cakupan pelayanan kesehatan balita adalah 100%, dan realisasinya mencapai 98,4%. Meskipun demikian, terdapat sedikit kesenjangan antara capaian kinerja sebesar 1,60%, yang menunjukkan bahwa belum mencapai target secara penuh. Meskipun terdapat kesenjangan kecil, cakupan pelayanan kesehatan balita yang mencapai 98,4% menandakan adanya komitmen dan upaya yang signifikan dalam memberikan perawatan kesehatan yang memadai bagi balita. Ini mencerminkan adanya sistem pelayanan kesehatan yang relatif efektif dalam memberikan layanan kepada anak-anak.

i) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Pendidikan Dasar adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana anak-anak yang berada pada usia pendidikan dasar menerima pelayanan kesehatan yang diperlukan untuk mendukung pertumbuhan, perkembangan, dan kesejahteraan mereka selama masa pendidikan dasar. Indikator ini mencakup berbagai aspek pelayanan kesehatan yang relevan dengan anak-anak usia sekolah dasar.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk usia pendidikan dasar hampir mencapai target yang telah ditetapkan. Target cakupan pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar adalah 100%, dan realisasinya mencapai 93,6%. Meskipun demikian, terdapat sedikit kesenjangan antara capaian kinerja sebesar 6,40%, yang menunjukkan bahwa belum mencapai target secara penuh. Meskipun belum

mencapai target secara penuh, kesenjangan sebesar 6,40% ini merupakan pencapaian yang cukup mendekati

j) Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM

Persentase Desa yang Melaksanakan STBM (Sanitasi Total Berbasis Masyarakat) adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana desa-desa atau komunitas menerapkan prinsip-prinsip STBM. STBM adalah pendekatan yang mencakup serangkaian tindakan terpadu yang bertujuan untuk meningkatkan sanitasi dan kesehatan masyarakat melalui partisipasi aktif masyarakat. Data menunjukkan bahwa persentase desa yang melaksanakan Sanitasi Total Berbasis Masyarakat (STBM) telah mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Capaian kinerja yang mencapai 100% menunjukkan bahwa seluruh desa dalam wilayah tersebut telah berhasil menerapkan program STBM.

k) Persentase Posyandu Strata Mandiri

Persentase Posyandu Strata Mandiri adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) di suatu wilayah atau komunitas telah mencapai tingkat mandiri atau swadaya. Posyandu adalah pos pelayanan kesehatan masyarakat di Indonesia yang menyelenggarakan kegiatan kesehatan ibu dan anak, seperti imunisasi, pemberian vitamin A, penimbangan balita, serta penyuluhan kesehatan.

Persentase Posyandu Strata Mandiri tidak mencapai target yang ditetapkan. Target persentase Posyandu Strata Mandiri adalah 85%, namun realisasinya hanya mencapai 76%. Meskipun demikian, terdapat kesenjangan yang relatif kecil sebesar 10,59% antara capaian kinerja dan target yang ditetapkan, adanya kesenjangan yang relatif kecil menunjukkan bahwa terdapat kemajuan dalam

pelaksanaan program Posyandu Strata Mandiri. Faktor yang menyebabkan ketidakcapaian ini seperti masalah aksesibilitas terhadap Posyandu, tingkat partisipasi masyarakat dan kendala lainnya dalam implementasi program di lapangan.

i) Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri

Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana program Desa Siaga, khususnya pada strata mandiri, telah mencapai tingkat aktivitas dan efektivitas tertentu di suatu desa atau wilayah. Program Desa Siaga adalah inisiatif yang dicanangkan di Indonesia untuk meningkatkan kesehatan ibu dan anak dengan melibatkan masyarakat secara aktif dalam upaya kesehatan pranatal dan perinatal.

persentase desa yang mempertahankan status Siaga Aktif Strata Mandiri telah melebihi target yang ditetapkan. Target persentase desa Siaga Aktif Strata Mandiri adalah 45%, namun realisasinya mencapai 45,3%. Capaian kinerja yang mencapai 45,3% menunjukkan bahwa lebih banyak desa telah mencapai atau mempertahankan status Siaga Aktif Strata Mandiri daripada yang telah ditargetkan. Program ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapsiagaan desa dalam menghadapi berbagai risiko, termasuk bencana alam, kesehatan masyarakat, dan keadaan darurat lainnya. Dengan lebih banyak desa yang aktif dalam program ini, diharapkan kesiapsiagaan masyarakat dalam menghadapi berbagai tantangan akan meningkat

m) Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat

Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) Rumah Tangga Sehat adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana rumah tangga menerapkan prinsip-prinsip PHBS, yang mencakup perilaku hidup

sehat dan sanitasi yang baik. PHBS mencakup berbagai aspek, termasuk kebersihan diri, kebersihan lingkungan, serta praktik-praktik sehat di rumah tangga. Indikator ini mencerminkan tingkat kesadaran dan kepatuhan rumah tangga terhadap perilaku yang mendukung kesehatan dan kebersihan.

Persentase Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS) di rumah tangga tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target persentase PHBS rumah tangga sehat adalah 86%, namun realisasinya hanya mencapai 65,7%. Terdapat kesenjangan sebesar 23,60% antara capaian kinerja dan target yang ditetapkan. Faktor penyebab utama adalah adanya salah satu indikator PHBS yang tidak bisa terpenuhi yaitu "merokok". Ketidaktercapaian ini menunjukkan adanya tantangan dalam meningkatkan kesadaran dan praktik PHBS di rumah tangga.

n) Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi

Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana fasilitas pelayanan kesehatan memenuhi standar kualitas dan keamanan yang telah ditetapkan oleh lembaga akreditasi kesehatan. Proses akreditasi melibatkan penilaian dan verifikasi terhadap standar kualitas pelayanan kesehatan yang diberikan oleh suatu fasilitas. Indikator ini mencerminkan tingkat kepatuhan dan kemampuan fasilitas pelayanan kesehatan untuk memenuhi standar-standar kualitas tertentu, yang dapat mencakup aspek infrastruktur, prosedur medis, sumber daya manusia, keamanan pasien, dan manajemen risiko. Fasilitas kesehatan yang terakreditasi dianggap telah memenuhi persyaratan tertentu untuk memberikan pelayanan kesehatan yang aman dan berkualitas.

Persentase sarana pelayanan kesehatan yang terakreditasi, khususnya Puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat), telah mencapai target yang ditetapkan. Target persentase terakreditasi untuk Puskesmas adalah 100%, dan realisasinya juga mencapai 100%. Capaian kinerja yang mencapai target menunjukkan bahwa semua Puskesmas telah berhasil memperoleh akreditasi sesuai standar yang ditetapkan. Dengan semua Puskesmas yang telah terakreditasi, masyarakat dapat yakin bahwa mereka akan menerima pelayanan kesehatan yang berkualitas dan terstandar saat mengunjungi Puskesmas. Ini akan membantu meningkatkan aksesibilitas dan kualitas.

o) Indeks Keluarga Sehat (IKS)

Indeks Keluarga Sehat (IKS) adalah indikator yang dihitung untuk mengukur tingkat kesehatan dan kesejahteraan keluarga secara menyeluruh. IKS mencerminkan sejauh mana suatu keluarga memenuhi kriteria tertentu yang berkaitan dengan kesehatan, lingkungan hidup, perilaku hidup sehat, dan kesejahteraan sosial. Indeks ini memberikan gambaran holistik tentang kondisi kesehatan dan kehidupan keluarga. IKS dirancang untuk memberikan pandangan yang lebih menyeluruh dan komprehensif tentang kesehatan dan kesejahteraan keluarga daripada sekadar melihat satu aspek tunggal.

Data menunjukkan bahwa Indeks Keluarga Sehat (IKS) tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target IKS adalah 0,9, namun realisasinya jauh di bawah target dengan nilai 0,142. Capaian kinerja tercatat sebesar 84,22%, yang menunjukkan terdapat kesenjangan yang signifikan antara capaian aktual dan target yang ditetapkan. Faktor yang menghambat dari sisi sumberdaya adalah keterbatasan sarana prasarana program.

Untuk meningkatkan IKS dan kesejahteraan keluarga, diperlukan upaya lintas sektoral yang komprehensif dan berkelanjutan. Ini melibatkan penguatan infrastruktur kesehatan dan pendidikan, program-program bantuan sosial yang tepat sasaran, peningkatan akses terhadap air bersih dan sanitasi, serta dukungan terhadap pengembangan ekonomi lokal.

p) Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk

Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana kapasitas rumah sakit mampu memenuhi kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat di suatu wilayah atau negara. Rasio ini mencerminkan hubungan antara jumlah tempat tidur atau kapasitas pelayanan rumah sakit dengan jumlah penduduk yang dapat dilayani.

Analisis Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk bahwa rasio daya tampung rumah sakit terhadap jumlah penduduk melebihi target yang telah ditetapkan. Target rasio ini adalah 0,51%, namun realisasinya mencapai 0,8%. Capaian kinerja tersebut memiliki nilai yang lebih tinggi dari target, menunjukkan bahwa daya tampung rumah sakit melebihi kebutuhan populasi.

q) Persentase Cakupan PBI Jamkesda

Persentase Cakupan PBI Jamkesda adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana Program Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) memberikan perlindungan kesehatan kepada Peserta Penerima Bantuan Iuran (PBI). PBI adalah mereka yang mendapatkan bantuan iuran dari pemerintah atau pihak lain untuk ikut serta dalam program jaminan kesehatan. Indikator ini

mencerminkan proporsi Peserta PBI Jamkesda yang telah tercakup atau terdaftar dalam program. Cakupan PBI Jamkesda menjadi penting untuk menilai keberhasilan program jaminan kesehatan daerah dalam menyediakan akses terhadap pelayanan kesehatan bagi kelompok yang menerima bantuan iuran.

Data menunjukkan bahwa persentase cakupan Program Bantuan Iuran (PBI) Jaminan Kesehatan Daerah (Jamkesda) telah melebihi target yang telah ditetapkan. Target cakupan adalah 100%, namun realisasinya mencapai 125,15%. Capaian kinerja tersebut menunjukkan bahwa lebih banyak penduduk yang terdaftar atau tercakup dalam Program Bantuan Iuran Jamkesda yaitu masyarakat miskin daripada yang telah ditargetkan. Pencapaian yang sangat positif dan menunjukkan keberhasilan dalam upaya meningkatkan akses masyarakat terhadap layanan kesehatan yang terjangkau. Dengan lebih banyak penduduk yang tercakup dalam program ini, biaya kesehatan menjadi lebih terjangkau bagi mereka yang membutuhkan, dan akses terhadap perawatan kesehatan menjadi lebih mudah.

r) **Bed Occupancy Rate (BOR)**

Bed Occupancy Rate (BOR) atau Tingkat Hunian Tempat Tidur adalah indikator yang dihitung untuk mengukur seberapa banyak tempat tidur di suatu fasilitas kesehatan digunakan atau terisi oleh pasien dalam suatu periode waktu tertentu. Indikator ini memberikan gambaran tentang tingkat pemanfaatan kapasitas tempat tidur di rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya.

Data menunjukkan bahwa Bed Occupancy Rate (BOR) telah melebihi target yang ditetapkan. Target BOR adalah 50%, namun realisasinya mencapai 59,6%, dengan

kelebihan capaian sebesar 19,20%. Ini mengindikasikan bahwa tingkat penggunaan tempat tidur di rumah sakit lebih tinggi dari yang diharapkan.

s) Persentase Capaian SPM Rumah Sakit

Persentase Capaian SPM Rumah Sakit adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana suatu rumah sakit mencapai atau memenuhi Standar Pelayanan Minimal (SPM). SPM merupakan standar yang ditetapkan untuk memberikan panduan tentang kualitas dan cakupan pelayanan kesehatan yang harus dipenuhi oleh suatu rumah sakit. Indikator ini mencerminkan sejauh mana rumah sakit berhasil memenuhi atau melampaui standar kualitas dan pelayanan yang telah ditetapkan oleh lembaga atau otoritas kesehatan. Standar Pelayanan Minimal dapat mencakup berbagai aspek, termasuk pelayanan klinis, manajemen fasilitas, keamanan pasien, dan aspek lain yang relevan dengan penyelenggaraan pelayanan kesehatan di rumah sakit.

Data menunjukkan bahwa persentase capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) Rumah Sakit tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target capaian adalah 86%, namun realisasinya hanya mencapai 76,94%, dengan kesenjangan antara capaian kinerja dan target sebesar 10,53%. Ketidakcapaian ini mengindikasikan bahwa rumah sakit kurang mampu memenuhi standar pelayanan minimal yang telah ditetapkan. SPM adalah seperangkat standar yang menetapkan kriteria dan kualitas minimum pelayanan yang harus disediakan oleh rumah sakit untuk memastikan pelayanan yang memadai dan berkualitas bagi pasien. Faktor yang mungkin menyebabkan ketidakcapaian ini, termasuk kurangnya

sumber daya, masalah manajemen, kurangnya pelatihan staf.

t) Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana populasi usia produktif mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Usia produktif biasanya merujuk pada rentang usia di mana seseorang secara potensial aktif secara ekonomi dan berkontribusi pada masyarakat. Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Produktif memberikan gambaran tentang sejauh mana populasi usia produktif menerima perawatan kesehatan yang dapat mendukung kesejahteraan mereka, produktivitas, dan kualitas hidup.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia produktif tidak mencapai target yang telah ditetapkan. Target cakupan adalah 100%, namun realisasinya hanya mencapai 72,45%, dengan kesenjangan antara capaian kinerja dan target sebesar 27,55%. Ketidakcapaian ini menyoroti adanya tantangan dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai kepada kelompok usia produktif. faktor yang mungkin menyebabkan ketidakcapaian ini total populasi yang sangat banyak, termasuk akses terbatas terhadap layanan kesehatan, kurangnya kesadaran tentang pentingnya perawatan preventif, atau kurangnya infrastruktur kesehatan yang memadai untuk melayani kebutuhan kelompok usia produktif.

u) Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut

Cakupan Pelayanan Kesehatan pada Usia Lanjut adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana populasi usia lanjut atau lansia mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Indikator ini

mencerminkan tingkat akses dan penggunaan layanan kesehatan oleh orang-orang yang berusia lanjut, yang seringkali memiliki kebutuhan kesehatan yang berbeda dan lebih kompleks.

Cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut telah melebihi target yang ditetapkan. Target cakupan adalah 100%, namun realisasinya mencapai 129,7%, dengan kelebihan capaian sebesar 29,70%. Kelebihan capaian ini adalah pencapaian yang positif dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam memberikan pelayanan kesehatan yang memadai bagi kelompok usia lanjut. Tingginya cakupan pelayanan kesehatan pada usia lanjut dapat memiliki dampak yang positif pada kesehatan dan kesejahteraan kelompok ini. Dengan akses yang lebih baik terhadap perawatan kesehatan, diharapkan bahwa kelompok usia lanjut dapat mengelola kondisi kesehatan mereka dengan lebih baik, mencegah penyakit, dan meningkatkan kualitas hidup mereka secara keseluruhan.

v) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana penderita hipertensi mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Hipertensi atau tekanan darah tinggi adalah kondisi medis yang dapat berdampak serius pada kesehatan jika tidak dikelola dengan baik. Indikator ini memberikan gambaran tentang upaya pencegahan, pengelolaan, dan pengendalian hipertensi dalam suatu populasi. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi membantu memastikan bahwa individu dengan hipertensi mendapatkan perawatan yang sesuai, yang pada gilirannya dapat meningkatkan kualitas hidup dan mengurangi risiko komplikasi kesehatan yang serius.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita hipertensi tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun cakupan mencapai 95,69%, terdapat kesenjangan sebesar 4,31% antara capaian kinerja dan target yang ditetapkan. Meskipun tidak tercapai, capaian sebesar 95,69% menunjukkan upaya yang signifikan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi. Namun, penting untuk terus meningkatkan capaian ini agar semua penderita hipertensi dapat menerima perawatan yang mereka butuhkan. Selain itu, penting juga untuk mengidentifikasi faktor-faktor yang mungkin menghambat akses penderita hipertensi terhadap perawatan, seperti biaya, lokasi fasilitas kesehatan, atau kurangnya pemahaman tentang pentingnya pengelolaan hipertensi. Dengan mengatasi hambatan ini, diharapkan cakupan pelayanan kesehatan bagi penderita hipertensi dapat ditingkatkan dan target yang ditetapkan dapat tercapai.

w) Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus

Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana penderita diabetes melitus mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Diabetes melitus adalah penyakit kronis yang memerlukan perawatan dan manajemen yang berkelanjutan untuk mencegah komplikasi dan mempertahankan kesejahteraan penderita. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus membantu memastikan bahwa individu dengan diabetes melitus mendapatkan perawatan yang sesuai, meningkatkan kualitas hidup, dan mengurangi risiko komplikasi yang dapat timbul.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk penderita diabetes melitus jauh melebihi target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 100%, realisasi mencapai 156,44%, dengan kelebihan capaian sebesar 56,44%. Oleh karena itu, penting untuk memastikan bahwa kelebihan capaian ini dikelola dengan baik, dengan memperhatikan keberlanjutan dan kualitas pelayanan kesehatan bagi penderita diabetes melitus.

x) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana orang dengan gangguan jiwa berat atau gangguan mental serius mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Gangguan jiwa berat mencakup kondisi seperti skizofrenia, gangguan bipolar, depresi berat, dan gangguan jiwa serius lainnya. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat sangat penting untuk memastikan bahwa orang dengan gangguan mental serius mendapatkan perawatan yang adekuat dan komprehensif serta dapat hidup secara Mandiri dan berpartisipasi dalam masyarakat

Data menunjukkan bahwa cakupan pelayanan kesehatan untuk orang dengan gangguan jiwa berat jauh melebihi target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 100%, realisasi mencapai 112,17%, dengan kelebihan capaian sebesar 12,17%. Dengan meningkatnya cakupan pelayanan kesehatan, diharapkan orang dengan gangguan jiwa berat dapat menerima perawatan yang diperlukan untuk mengelola kondisi mereka dengan lebih efektif. Pelayanan kesehatan yang memadai bagi mereka dapat membantu meningkatkan kualitas hidup,

mengurangi risiko komplikasi, dan memfasilitasi reintegrasi sosial.

y) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Tuberkulosis (TBC) adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana individu yang terinfeksi atau terkena TBC mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Tuberkulosis adalah penyakit infeksi bakteri yang dapat menyerang paru-paru dan organ tubuh lainnya, dan pelayanan kesehatan yang tepat dan cepat sangat penting untuk pencegahan dan pengendalian penyakit ini. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC membantu memastikan bahwa penderita TBC mendapatkan perawatan yang sesuai dan bahwa upaya kontrol dan pencegahan penyakit ini dapat dilakukan secara efektif.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk orang dengan tuberkulosis (TBC) jauh melebihi target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 100%, realisasi mencapai 108,3%, dengan kelebihan capaian sebesar 8,03%. Dengan demikian, kelebihan capaian dalam cakupan pelayanan kesehatan bagi orang dengan TBC adalah pencapaian yang positif dan menunjukkan komitmen yang kuat dalam menangani masalah kesehatan masyarakat yang penting ini. Tantangan selanjutnya adalah untuk memastikan bahwa tingkat capaian yang tinggi ini dipertahankan dan dikelola dengan baik untuk meningkatkan kualitas hidup dan kesejahteraan mereka secara keseluruhan.

z) Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV

Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV adalah indikator yang dihitung untuk

mengukur sejauh mana individu yang memiliki risiko tinggi terinfeksi HIV mendapatkan pelayanan kesehatan yang diperlukan. Indikator ini mencakup berbagai aspek pelayanan HIV, termasuk pencegahan, deteksi, pengobatan, dan dukungan bagi individu yang berada pada risiko tinggi terinfeksi HIV. Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Berisiko Tinggi Terinfeksi HIV penting untuk memastikan bahwa pencegahan, deteksi, dan manajemen HIV dilakukan secara holistik dan efektif untuk kelompok populasi yang memiliki risiko tinggi terinfeksi HIV.

Cakupan pelayanan kesehatan untuk orang berisiko tinggi terinfeksi HIV tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 100%, realisasi hanya mencapai 86,56%, dengan kesenjangan antara capaian kinerja dan target sebesar 13,44%. Capaian sebesar 86,56% menunjukkan adanya upaya dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi orang yang berisiko tinggi terinfeksi HIV. Namun, perlu upaya lebih lanjut untuk meningkatkan cakupan dan mencapai target yang telah ditetapkan. Penyebab ketidakcapaian, termasuk kurangnya aksesibilitas terhadap layanan kesehatan, stigma terhadap HIV, kurangnya kesadaran akan risiko dan pentingnya pencegahan, serta kendala sosial dan ekonomi lainnya. Selain itu penting untuk memperkuat kerja sama antara berbagai pihak terkait, termasuk pemerintah, lembaga kesehatan, organisasi non-pemerintah, dan masyarakat umum, untuk merancang dan melaksanakan program-program yang efektif dalam meningkatkan cakupan pelayanan kesehatan bagi orang yang berisiko tinggi terinfeksi HIV.

aa) Cakupan Desa UCI

Cakupan Desa Universal Coverage Immunization (UCI) adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana suatu desa atau wilayah mencapai cakupan vaksinasi yang merata dan melibatkan seluruh populasi anak yang memenuhi kriteria imunisasi. Imunisasi adalah langkah penting dalam pencegahan penyakit menular, dan Universal Coverage Immunization (UCI) bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak mendapatkan vaksin yang diperlukan sesuai dengan jadwal imunisasi yang direkomendasikan. Cakupan Desa UCI mencerminkan komitmen untuk menyediakan perlindungan vaksinasi yang merata dan merinci di tingkat desa untuk mencapai target kesehatan masyarakat.

Data menunjukkan bahwa cakupan Desa UCI tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 96%, realisasi hanya mencapai 91,7%, dengan kesenjangan antara capaian kinerja dan target sebesar 4,3%. Meskipun tidak tercapai, capaian sebesar 91,7% menunjukkan adanya upaya dalam memperluas cakupan imunisasi anak secara universal. Program imunisasi anak memiliki dampak yang signifikan dalam mencegah penyakit menular yang dapat dicegah dan mengurangi angka kematian anak. Penyebab ketidakcapaian ini bervariasi, termasuk kurangnya akses terhadap layanan kesehatan, kurangnya kesadaran orang tua tentang pentingnya imunisasi, ketakutan atau kekhawatiran tentang efek samping imunisasi, serta kendala logistik. Dengan meningkatnya cakupan imunisasi anak, diharapkan dapat mencapai herd immunity yang dapat melindungi populasi secara keseluruhan dari penyakit yang dapat dicegah melalui imunisasi.

bb) Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani

Persentase Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana suatu entitas atau sistem kesehatan berhasil menangani kejadian luar biasa (KLB) atau wabah penyakit. KLB merujuk pada peningkatan yang tiba-tiba dan tidak terduga dalam jumlah kasus penyakit di suatu wilayah atau populasi tertentu. Pentingnya indikator ini adalah untuk memastikan bahwa sistem kesehatan memiliki kemampuan yang memadai untuk menanggapi dengan cepat dan efektif terhadap situasi darurat kesehatan masyarakat seperti wabah penyakit atau KLB.

Persentase kejadian luar biasa (KLB) yang ditangani mencapai target yang ditetapkan, yakni 100%. Capaian ini menunjukkan bahwa sistem respons terhadap kejadian luar biasa (KLB) telah efektif dalam menangani situasi yang dihadapi. Penanganan yang cepat dan efisien terhadap KLB dapat membantu mengurangi dampaknya pada masyarakat, mencegah penyebaran lebih lanjut, dan memberikan perlindungan bagi populasi yang terkena dampak.

cc) Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar

Jumlah Puskesmas yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar adalah indikator yang dihitung untuk mengukur seberapa banyak puskesmas (Pusat Kesehatan Masyarakat) memenuhi standar ketenagaan minimal yang telah ditetapkan. Standar ketenagaan minimal mencakup keberadaan dan ketersediaan personel kesehatan yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif di puskesmas.

Puskesmas yang memenuhi ketenagaan minimal sesuai standar tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target adalah 37 Puskesmas, namun realisasi hanya mencapai 16 Puskesmas, dengan capaian kinerja sebesar 56,76%. Ketidakcapaian ini adanya masalah dalam pengadaan tenaga kesehatan yang memadai di Puskesmas, yang merupakan unit pelayanan kesehatan tingkat pertama yang sangat penting dalam sistem kesehatan masyarakat. Ketenagaan yang memadai di Puskesmas diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas kepada masyarakat. Penyebab ketidakcapaian ini termasuk keterbatasan anggaran, kesulitan merekrut dan mempertahankan tenaga kesehatan yang berkualitas, serta permasalahan terkait dengan distribusi tenaga kesehatan yang tidak merata antar wilayah.

dd) Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas

Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar pada Puskesmas adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana puskesmas memenuhi persyaratan ketersediaan obat-obatan esensial dan vaksin dasar yang diperlukan untuk memberikan layanan kesehatan yang efektif. Ketersediaan obat dan vaksin di puskesmas merupakan faktor penting dalam memastikan akses masyarakat terhadap pengobatan dan imunisasi yang diperlukan. Indikator ini membantu dalam menilai kemampuan puskesmas dalam menyediakan pelayanan kesehatan yang holistik dan memenuhi kebutuhan pengobatan dan imunisasi dasar masyarakat.

Persentase ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar pada Puskesmas mencapai target yang ditetapkan, yaitu 100%. Tidak terdapat kesenjangan antara

capaian kinerja dan target yang telah ditetapkan, dengan capaian sebesar 100%, ini menunjukkan bahwa ketersediaan obat esensial dan vaksin imunisasi dasar di Puskesmas telah memenuhi standar yang ditetapkan. Upaya terus dilakukan untuk mempertahankan dan meningkatkan ketersediaan obat-obatan dan vaksin tersebut guna mendukung upaya pencegahan dan pengendalian penyakit serta peningkatan kesehatan masyarakat secara keseluruhan.

ee) Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar

"Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar" adalah indikator yang dihitung untuk mengukur sejauh mana fasilitas kesehatan dasar dan rujukan memenuhi standar dalam hal sarana, prasarana, dan alat kesehatan yang diperlukan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang efektif.

Persentase pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan tidak mencapai target yang ditetapkan. Meskipun target cakupan adalah 100%, realisasi hanya mencapai 74,55%, dengan kesenjangan antara capaian kinerja dan target sebesar 25,45%, menunjukkan adanya masalah dalam pemenuhan sarana prasarana dan alat kesehatan di fasilitas kesehatan dasar dan rujukan. Penyebab ketidakcapaian ini termasuk keterbatasan anggaran, kurangnya infrastruktur yang memadai, kesulitan dalam pemeliharaan peralatan kesehatan, dan tantangan dalam pengadaan alat kesehatan yang berkualitas. Untuk meningkatkan capaian yang telah ditetapkan, perlu dilakukan upaya yang lebih

besar dalam meningkatkan investasi dalam infrastruktur kesehatan, memperbaiki manajemen aset dan pemeliharaan peralatan kesehatan, serta meningkatkan koordinasi antara berbagai pihak terkait. Namun demikian dengan hasil capaian 74,55% tidak menyebabkan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat menjadi terhambat, karena dengan minimal 60% saja dapat diartikan pelayanan kesehatan terhadap masyarakat mampu berjalan.

ff) Level Maturitas SPIP

SPIP (Sistem Pengendalian Intern Pemerintah) adalah sistem yang digunakan untuk mengukur tingkat kematangan atau maturitas pengendalian internal di lembaga pemerintah. Tingkat maturitas SPIP mencerminkan sejauh mana suatu organisasi pemerintah telah mengembangkan dan menerapkan sistem pengendalian internalnya.

gg) Hasil Evaluasi AKIP

Evaluasi AKIP (Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah) merupakan proses penilaian dan pengukuran kinerja instansi pemerintah di Indonesia. Evaluasi AKIP melibatkan sejumlah indikator yang dihitung untuk mengukur kinerja dan akuntabilitas suatu instansi pemerintah

hh) Kinerja Pelaporan Keuangan

Evaluasi Kinerja Pelaporan Keuangan melibatkan sejumlah indikator yang digunakan untuk mengukur seberapa baik suatu organisasi atau entitas dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangannya. Indikator tersebut membantu menilai transparansi, akurasi, dan keterbacaan informasi keuangan yang

disampaikan oleh organisasi kepada pemangku kepentingan

ii) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)

Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) adalah indikator yang dihitung untuk mengukur tingkat kepuasan masyarakat terhadap pelayanan atau kondisi tertentu yang diberikan oleh suatu organisasi atau pemerintah. IKM bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana pelayanan atau kondisi tersebut memenuhi harapan dan kebutuhan masyarakat.

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	33 Kasus	22 Kasus	33,33
2	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	112 Kasus	148 Kasus	132,14
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,49%	0,26%	46,94
4	Persentase Balita Stunting	Persen	7%	4%	42,86
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100%	79,6%	20,40
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100%	89,2%	10,80
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100%	88,5%	11,50
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100%	98,4%	1,60
9	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100%	93,6%	6,40
10	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	Persen	100%	100%	100
11	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	45%	45,3%	0,67
12	Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	85%	76%	10,59
13	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	Persen	86%	65,7%	23,60
14	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Persen	100%	100%	100

15	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,9	0,142%	84,22
16	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Perseratus ribu	0,510‰	0,80‰	56,86
17	Persentase Cakupan PBI Jamkesda	Per센	100%	125,15%	25,15
18	Bed Occupancy Rate (BOR)	Per센	50%	59,6%	19,20
19	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	Per센	86%	76,94%	10,53
20	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Per센	100%	72,4%	27,55
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Per센	100%	129,7%	29,70
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Per센	100%	95,6%	4,31
23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Per센	100%	156,4%	56,44
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Per센	100%	112,1%	12,17
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	Per센	100%	108,3%	8,03
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	Per센	100%	86,5%	13,44
27	Cakupan Desa UCI	Per센	96%	91,7%	4,48
28	Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	Per센	100%	100%	100
29	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	Puskesmas	37 Puskesmas	16 Puskesmas	56,76
30	Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	Per센	100%	100%	100
31	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan	Per센	100%	74,5%	25,45

	Dasar dan Rujukan Sesuai Standar					
32	Level Maturitas SPIP	Nilai	3			
33	Hasil Evaluasi AKIP	Mutu	BB			
34	Kinerja Pelaporan Keuangan	Nilai	600			
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,20			

Tabel 3.3 Data Capaian Kinerja Tahun 2021-2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Tahun 2021			Tahun 2022			Tahun 2023		
			Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja	Target	Realisasi	Capaian Kinerja
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	15	35	xx%	34	22	xx%	33 Kasus	13 Kasus	xx%
2	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	110	114		113	115		112 Kasus	101 Kasus	
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,54	0,52		0,52	0,20		0,49	0,26	
4	Persentase Balita Stunting	Persen	7,2	4,9		7,1	3,4		7	4	
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100	94,07		100	89,42		100	79,6	
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100	94,58		100	87,06		100	89,2	
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100	94,58		100	88,57		100	88,5	
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100	95,30		100	84,56		100	98,4	
9	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100	94,20		100	91,57		100	93,6	
10	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	Persen	100	100		100	100		100	100	
11	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	35	32,08		40	41,13		45%	45,3	
12	Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	75	62,60		80	67,33		85	76	
13	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	Persen	82	67,24		84	68,36		86	65,7	
14	Persentase Sarana Pelayanan	Persen	0	0		100	100		100	100	

	Kesehatan Terakreditasi									
15	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai			0,9	0,12		0,9	0,142%	
16	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Perseratus ribu			0,50	0,40		0,510%	0,80%	
17	Percentase Cakupan PBI Jamkesda	Persen			100	99,97		100%	125,15%	
18	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen						50%	59,6%	
19	Percentase Capaian SPM Rumah Sakit	Persen						86%	76,94%	
20	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100	59,24		100	68,61		100	72,4
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100	80,77		100	86,17		100	129,7
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	23,15	23,25		39,20	39,20		100	95,6
23	Cakupan Pelayanan Keachatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100	36,32		100	47,74		100	156,4
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100	86,29		100	86,53		100	112,1
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	Persen				100	94,43		100	108,3
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	Persen	100	73,99		100	90,92		100%	86,5%
27	Cakupan Desa UCI	Persen	100	72,08		100	93,64		96	91,7
28	Percentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	Persen	100	100		100	100		100%	100%
29	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan	Puskesmas	0	0		0	0		37 Puskesmas	16 Puskesmas

	Minimal Sesuai Standar										
30	Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	Persen							100%	100%	
31	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	Persen							100%	74,5%	
32	Level Maturitas SPIP	Nilai							3		
33	Hasil Evaluasi AKIP	Mutu							BB		
34	Kinerja Pelaporan Keuangan	Nilai							600		
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	82,67	93,56		81,60	83,62		81,20		

Tabel 3.4 Perbandingan Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjauhan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan Target Perubahan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kesehatan	Nilai	80,46%	84,55%	105,08

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan target jangka menengah tahun 2024 yang tercantum dalam RPJMD 2019-2024 menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan mengalami peningkatan capaian kinerja sebesar **4,09%**. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

**Tabel 3.5 Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran
Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan
Keterjangkauan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan
Standar Provinsi Jawa Barat/Nasional**

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kesehatan	Nilai	84,48 (Provinsi)	84,55	100,08
			82,97 (Nasional)		101,90

Perbandingan realisasi kinerja tahun 2023 dengan standar Provinsi Jawa Barat dan Nasional menunjukkan bahwa capaian kinerja sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dan keterjangkauan pelayanan kesehatan melebihi dari target Provinsi sebesar 0,07%, dan melebihi target Nasional 1,58%. kondisi ini dapat dikatakan bahwa kinerja berjalan sesuai dengan rencana.

Dalam pelaksanaan capaian kinerja Meningkat Derajat Kesehatan Masyarakat terdapat faktor penghambat, pendukung dan rencana aksi yang mempengaruhi terhadap pencapaian sasaran indikator Kinerja di Kabupaten Ciamis adalah sebagai berikut:

A. Faktor Penghambat

Kurangnya pengetahuan dan keterampilan, faktor sosial ekonomi.

B. Faktor Pendukung

Akses terhadap layanan kesehatan yang mulai merata, ketersediaan potensi sumber daya manusia yang menunjang, pengembangan infrastruktur kesehatan yang menunjang, peran aktif masyarakat, dukungan finansial yang memadai dari pemerintah.

C. Rencana Aksi

1. Mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam upaya kesehatan masyarakat
2. Meningkatkan aksesibilitas dan kualitas pelayanan kesehatan primer
3. Mengintegrasikan teknologi kesehatan seperti telemedicine dan aplikasi kesehatan untuk meningkatkan aksesibilitas dan kualitas layanan kesehatan
4. Menggalang dukungan dari berbagai sektor termasuk pemerintah, sektor swasta, dan masyarakat sipil untuk berkolaborasi
5. Melaksanakan kampanye promosi kesehatan

B. Akuntabilitas Keuangan

Tabel 3.6 Data Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

PROGRAM/KEGIATAN/SUB KEGIATAN	ANGGARAN	REALISASI	SISA	CAPAIAN %
Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.576.527.554	279.431.834.961	5.444.692.593	98,09
Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	151.558.455.769	123.010.129.920	28.548.325.849	81,16
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.780.724.000	8.071.872.795	2.708.851.205	74,87
Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	547.454.000	539.916.000	7.538.000	98,62
Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.014.261.293	2.885.685.900	128.575.393	95,73

Tahun 2023, Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis memperoleh anggaran sebesar Rp 450.777.422.616,- yang dapat direalisasikan sebesar Rp 413.939.439.576,- Dengan demikian kinerja keuangan tercapai sebesar 91,83%. Dari

Kinerja tersebut diperoleh efisiensi pemanfaatan anggaran sebesar 8,17% atau Rp 36.837.983.040,-

C. Prestasi (Perangkat Daerah)

Berikut adalah daftar prestasi Dinas Kesehatan selama tahun 2023 :

1. Peringkat 1 Persentase Fasilitas Pelayanan Kesehatan Menerapkan Rekam Medis Elektronik (RME)
2. Tenaga kesehatan teladan tingkat nasional tahun 2023

BAB IV

PENUTUP

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Kesehatan Tahun 2023 merupakan bentuk akuntabilitas pencapaian kinerja dan penggunaan sumber daya dalam lingkup tugas dan fungsi Dinas Kesehatan Kabupaetn Ciamis selama tahun 2023. LKIP ini memuat hasil pengukuran kinerja dan analisis terhadap capaian kinerja sasaran strategis Renstra dan Perjanjian Kinerja Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023.

Dinas Kesehatan Kabupaetn Ciamis pada tahun 2023 berhasil mencapai kinerja dengan sangat baik. Sebanyak 35 Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis berhasil tercapai melampaui target kinerja dengan faktor pendorong keberhasilan diantaranya tingginya komitmen, beragam inovasi serta kolaborasi.

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis pada tahun 2023 berhasil memanfaatkan sumber daya organisasi sesuai dengan peruntukannya. Sumber daya keuangan yang dimanfaatkan untuk mendukung pencapaian sasaran strategis pada tahun 2023 adalah sebesar **Rp 450.777.422.616,-** dengan total efisiensi sebesar **8,17%** atau senilai **Rp 36.837.983.040,-**

Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis terus berupaya mendukung Pemerintah dalam rangka meningkatkan akuntabilitas kinerja melalui berbagai inisiatif-inisiatif strategis, dengan harapan dapat tercapai pemerintahan yang kapabel, bersih dan akuntabel dalam mendorong peningkatan kualitas pelayanan publik menjadi lebih baik.

LAMPIRAN

1. Perjanjian Kinerja

 <p>PERUBAHAN PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023</p> <p>Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, kita berkomitmen pada hasil kami yang bertanda tangan di bawah ini:</p> <p>Nama : dr. H. YOTO, MM. Kra Jabatan : KEPALA DINAS KESIHATAN KABUPATEN CIAMIS</p> <p>Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA</p> <p>Nama : Dr. H. HENDIAT SURARYA Jabatan : BUPATI CIAMIS</p> <p>Selaku atasan langsung pihak pertama, selanjutnya disebut pihak kedua</p> <p>Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan Keberhasilan dan kragalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.</p> <p>Pihak kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dan perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka penyerahan penghargaan dan sanksi.</p> <p style="text-align: right;">Ciamis, 22 November 2020 PIHAK PERTAMA</p> <p style="text-align: left;">PIHAK KEDUA</p> <p style="text-align: right;">Dr. H. HENDIAT SURARYA</p> <p style="text-align: right;">dr. H. YOTO, MM. Kra</p>
--

NO	SATUARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023	
			INDIKATOR	WAKTU
1	Berturut-turut Kesehatan Bu Duk Bayi serta Balita di Wilayah Perku	1. Penilaikan Kesehatan Bayi 2. Jumlah Kesehatan Bayi 3. Penilaikan Kesehatan Balita 4. Penilaikan Balita Miskin 5. Calon pasien Kesehatan Kesehatan Bu Duk Bayi 6. Calon pasien Kesehatan Kesehatan Balita 7. Calon pasien Pengobatan Anemia Bayi & Balita Cerdas 8. Calon pasien Pengobatan Kegembaran Balita 9. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Balita yang membutuhkan asuhan	100%	2023
2	Meningkatnya Kesehatan Masyarakat Untuk Masa Depan Dibidang Lingkungan Yang Sehat	1. Penilaikan Orang yang Membelakukan STTB 2. Penilaikan Dinas Sosial Afrozalat Mandiri 3. Penilaikan Pengawas Wilayah Mandiri 4. Penilaikan PMBN Rumah Tangga Sehat	100%	2023
3	Meningkatnya Kualitas Pelayanan Kesehatan Dalam Dua Bidang Kesehatan Gorte Tradisional Sebagai Pendukung Kesehatan	1. Penilaikan Kesehatan Pengobatan Kesehatan Terstruktural 2. Indeks Kesehatan Gorte 1000 3. Kesehatan Dinas Tercapai Rendah, Sedang, Tercapai, Baik dan Sangat Baik 4. Penilaikan Calon pasien PMB Narkotika 5. Indeks Occupancy Rate (ORH) 6. Penilaikan Operasional SPBM Rumah Sakit 7. Indeks pasien Kesehatan Kesehatan pada unit operasional 8. Calon pasien Kesehatan Padat Usia Lanjut 9. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Pendeksi Narkotika Rigiditas 10. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Pendeksi Narkotika Merti 2 11. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Psikologis 12. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Orang Dengan TBC 13. Calon pasien Dosis UCI 14. Penilaikan Kepuasan Pasien Dalam Kesehatan yang Diberikan	100%	2023
4	Berturut-turut Angka Kematian dan Kematian Akibat Penyakit Non Infeksi dan Tidak Bisa Diketahui Dari Meningkatnya Kesehatan Jantung	1. Indeks pasien Kesehatan pada unit operasional 2. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Padat Usia Lanjut 3. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Pendeksi Narkotika Rigiditas 4. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Pendeksi Narkotika Merti 2 5. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Psikologis 6. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Orang Dengan TBC 7. Calon pasien Pengobatan Kesehatan Orang Dengan Dosis UCI 8. Penilaikan Kepuasan Pasien Dalam Kesehatan yang Diberikan	100%	2023

NO	BASIS STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
6	Meningkatnya Kapasitas dan Kompetensi SDM di Dalam Terwujudnya Sistem Pendukung Kedamaian dan Aksi Kesehatan	1. Tingkat Penerapan dan Efektivitas Pengelolaan Masyarakat Keluarga 2. Perseentase Ketercapaian Rencana Tindaklanjut Wilayah 3. Persentase Penurunan Jumlah Penyalahgunaan Alat Kesehatan dan Penyalahgunaan Obat-obatan Psikotika Kewilayahan Daerah dan Pengaruh Terhadap Masyarakat	17. Penerapan 100% 100%
8	Meningkatnya Absorbsi dan Kapasitas Organisasi Dalam Kembangkan Kinerja dan Kapasitas	1. Tingkat Maritimitas SGP 2. Hasil Penilaian APRD 3. Kriteria Pelaporan Keuangan 4. Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	1 100 600 41,20
	Program	Aggrgat	Keterangan
1	Program Penanggung Urusan Penyebarluasan Uang Kebutuhan/Kota	Rp. 1.61.620.164.922	APBD Kebutuhan, RUD
2	Program Pembentukan Organisasi Kesehatan Pemeringgu dan Upaya Kehidupan Masyarakat	Rp. 110.926.329.374	APBD Kebutuhan, DAB, Usulan Koma APRD Kebutuhan
3	Program Pengembangan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	Rp. 6.503.224.000	
4	Program Sekdaat Parchas, Aksi Kewilayahan Dan Makanan Wairasat	Rp. 147.454.000	APBD Kebutuhan, DAB
5	Program Penerbangan Masyarakat Bidang Kesehatan	Rp. 1.014.201.762 Rp. 304.613.012.874	

BUPATI CIMAESA

Dr. H. YOHANNES GEMASTI

CIMAESA, 23 November 2023
KEPALA DILAKUKAN KEMBALIAN
KABUPATEN CIMAESA

S/ N. FOTO. MM Ido

Capaian Kinerja Tahun 2023

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Jumlah Kematian Ibu	Kasus	33 Kasus	22 Kasus	33,33
2	Jumlah Kematian Bayi	Kasus	112 Kasus	148 Kasus	132,14
3	Persentase Balita Gizi Buruk	Persen	0,49%	0,26%	46,94
4	Persentase Balita Stunting	Persen	7%	4%	42,86
5	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil	Persen	100%	79,60%	20,4
6	Cakupan Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin	Persen	100%	89,20%	10,8
7	Cakupan Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir	Persen	100%	88,50%	11,5
8	Cakupan Pelayanan Kesehatan Balita	Persen	100%	98,40%	1,6
9	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia pendidikan dasar	Persen	100%	93,60%	6,4
10	Persentase Desa Yang Melaksanakan STBM	Persen	100%	100%	100
11	Persentase Desa Siaga Aktif Strata Mandiri	Persen	45%	45,30%	0,67
12	Persentase Posyandu Strata Mandiri	Persen	85%	76%	10,59
13	Persentase PHBS Rumah Tangga Sehat	Persen	86%	65,70%	23,6
14	Persentase Sarana Pelayanan Kesehatan Terakreditasi	Persen	100%	100%	100
15	Indeks Keluarga Sehat (IKS)	Nilai	0,9	0,14%	84,22
16	Rasio Daya Tampung Rumah Sakit Terhadap Jumlah Penduduk	Perseratus ribu	0,510‰	0,80‰	56,86
17	Persentase Cakupan PBI Jamkesda	Persen	100%	125,15%	25,15
18	Bed Occupancy Rate (BOR)	Persen	50%	59,60%	19,2
19	Persentase Capaian SPM Rumah Sakit	Persen	86%	76,94%	10,53
20	Cakupan Pelayanan kesehatan pada usia produktif	Persen	100%	72,40%	27,55
21	Cakupan Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut	Persen	100%	129,70%	29,7
22	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi	Persen	100%	95,60%	4,31
23	Cakupan Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus	Persen	100%	156,40%	56,44
24	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan Gangguan Jiwa Berat	Persen	100%	112,10%	12,17
25	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Dengan TBC	Persen	100%	108,30%	8,03
26	Cakupan Pelayanan Kesehatan Orang Beresiko Tinggi Terinfeksi HIV	Persen	100%	86,50%	13,44
27	Cakupan Desa UCI	Persen	96%	91,70%	4,48
28	Persentasi Kejadian Luar Biasa (KLB) Yang Ditangani	Persen	100%	100%	100
29	Jumlah Puskesmas Yang Memenuhi Ketenagaan Minimal Sesuai Standar	Puskesmas	37 Puskesmas	16 Puskesmas	56,76

30	Persentase Ketersediaan Obat Esensial dan Vaksin Imunisasi Dasar Pada Puskesmas	Persen	100%	100%	100
31	Persentase Pemenuhan Sarana Prasarana dan Alat Kesehatan di Fasilitas Kesehatan Dasar dan Rujukan Sesuai Standar	Persen	100%	74,50%	25,45
32	Level Maturitas SPIP	Nilai	3		
33	Hasil Evaluasi AKIP	Mutu	BB		
34	Kinerja Pelaporan Keuangan	Nilai	600		
35	Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Nilai	81,2		

Perbandingan Data Capaian Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjakanan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan Target Perubahan RPJMD

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target RPJMD	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kesehatan	Nilai	80,46%	84,55%	105,08

Perbandingan Realisasi Kinerja Sasaran Meningkatnya Derajat Kesehatan Masyarakat dan Keterjakanan Pelayanan Kesehatan Tahun 2023 dengan Standar Provinsi Jawa Barat/Nasional

No	Indikator Kinerja	Satuan	Target	Realisasi	Capaian %
1	Indeks Kesehatan	Nilai	84,48 (Provinsi)	84,55	100,08
			82,97 (Nasional)		101,9

Data Realisasi Anggaran Dinas Kesehatan Kabupaten Ciamis Tahun 2023

No	Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Anggaran	Realisasi	Sisa	Capaian %
1	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	284.876.527.554	279.431.834.961	5.444.692.593	98,09
2	Program Pemenuhan Upaya Kesehatan Perorangan Dan Upaya Kesehatan Masyarakat	151.558.455.769	123.010.129.920	28.548.325.849	81,16
3	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Kesehatan	10.780.724.000	8.071.872.795	2.708.851.205	74,87
4	Program Sediaan Farmasi, Alat Kesehatan Dan Makanan Minuman	547.454.000	539.916.000	7.538.000	98,62
5	Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan	3.014.261.293	2.885.685.900	128.575.393	95,73